PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA

Role of BPRS Formes Yogyakarta in Assisting The Management of The Covid-19 Impacts on MSME in Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

GHITHA NABILAH AZMI

17423056

ACC Munaqasah
11 November 2021

Siti Latifah Mubasiroh

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ghitha Nabilah Azmi
NIM	: 17423056
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 November 2021



Ghitha Nabilah Azmi

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	6 Desember 2021
Nama	:	GHITHA NABILAH AZMI
Nomor Mahasiswa	:	17423056
Judul Skripsi	:	Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Yogyakrta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)

Penguji I
Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)

Penguji II
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Pembimbing
Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd. (.....)

Yogyakarta, 6 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi, menerangkan di bawah ini bahwa:

Nama : Ghitha Nabilah Azmi

NIM : 17423056

Judul Skripsi : Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 November 2021



Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 November 2021 M

5 Rabiul Awal 1443 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 657/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal surat 31 Mei 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Ghitha Nabilah Azmi
Nomor Induk Mahasiswa	: 17423056
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2020/2021
Judul Skripsi	: Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya sayangi dan saya cintai. Bapak Siswanto dan Ibu Mariani. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk dua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih banyak untuk kasih sayang tulus dan doa yang tak pernah henti-hentinya umi buya berikan. Semoga saya bisa diberikan waktu yang panjang untuk membuat umi buya bahagia.

Untuk kakak, Difta Isti Wandani. Terima kasih banyak sudah sabar menjadi tempat berkeluh kesah walaupun disaat mungkin kakak lagi gak baik-baik aja. Terima kasih sudah selalu khawatir. Untuk abang, Muhammad Anshari Fadhilah. Abang terima kasih udah memberikan support baik dari doa, semangat, sampai tambahan uang saku. Terima kasih sudah menjadi contoh yang baik.

Untuk Eggsy, Mbak Adin, Mbak Rara, Nadia, Aeni, Audrin, Ratie. Terima kasih banyak untuk sabar, waktu dan tawanya, Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Terima kasih untuk doa dan dukungannya sampai akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan. Terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah selama ini. Terima kasih sudah membantu saya melewati semuanya. Beruntung punya kalian yang selalu ada, selalu memberikan kekuatan walaupun mungkin kalian gak sadar.

Terakhir, untuk diri ini. Terima kasih sudah berjuang sampai akhir. Terima kasih untuk semua air mata. Terima kasih sudah kuat.

Hanya Allah yang bisa membalas semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan Kesehatan serta keberkahan.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(*Q.S Al-Baqarah : 286*)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ,إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(*Q.S Al-Insyirah : 5-6*)

ABSTRAK

PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA

Ghitha Nabilah Azmi

17423056

Pandemi Covid-19 bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada UMKM dengan risiko serius dimana lebih dari 50% UMKM tidak akan bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta sebagai salah satu model lembaga keuangan Syariah yang paling sederhana yang bergerak di kalangan masyarakat bawah dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan upaya yang dilakukan BPRS Formes Yogyakarta terhadap UMKM pada masa pandemi yaitu melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan, memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan moril seperti monitoring terhadap perkembangan usaha, smelakukan doa bersama rutin yang dilakukan oleh seluruh karyawan sebelum memulai pekerjaan, serta memberikan perhatian mengenai kebutuhan dan kendala.

Kata Kunci: Covid-19, UMKM, restrukturisasi

ABSTRACT

ROLES OF BPRS FORMES YOGYAKARTA IN ASSISTING THE MANAGEMENT OF THE COVID-19 IMPACTS ON MSME IN YOGYAKARTA

Ghitha Nabilah Azmi
17423056

The Covid-19 pandemic is an epidemic that cannot be ignored. This pandemic has a significant implication which potentially causes a quite large economic crisis marked by the suspension of production activities in many countries, declined public consumption, loss of consumer trust, stock market crash, thus leading to uncertainty. The crisis due to the pandemic will seriously affect MSMEs, where more than 50% of MSMEs will not survive. This study aimed to determine the roles and efforts of BPRS Formes Yogyakarta, as one of the simplest models of Islamic financial institutions of which the operating activities target the lower classes, in assisting the management of the Covid-19 impacts on MSMEs in Yogyakarta. The results of this study showed that the roles and efforts of BPRS Formes Yogyakarta for MSMEs during the pandemic include: implementing a financial restructuring program, providing social assistance, providing moral assistance such as monitoring business development, holding regular religious briefing and prayer involving all its employees prior to starting work, and paying attention to needs and challenges.

Keywords: *Covid-19, MSME, restructuring*

December 11, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah

5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ْوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ىَ...ا َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ىِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qĭla

رَمَى - ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madĭnah
	- al-Munawwarah
	- al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ	– nazzala
البِرّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	- ta'khużūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'		

شَيئٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ الأَمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamĭ'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَاوَحَبِيْبِنَامُحَمَّدٍوَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِيْنَ،

تَبِعَهُمْ بِإِ حْسَا نٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ،أَمَا بِعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Yogyakarta".**

Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skrisi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I.,M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Bapak Muhammad Rosyid selaku Direktur Utama BPRS Formes Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi saya untuk melakukan penelitian di BPRS Formes Yogyakarta.
8. Bu Idha, Mbak Eva, Mbak Latifah dan Mbak Wulan selaku karyawan BPRS Formes Yogyakarta yang telah membantu saya dalam melakukan pengumpulan data wawancara.
9. Kedua orang tua yang saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih saying, cinta dan doat ulus kepada peneliti, serta memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan kasih sayangnya.
10. Kakak, dan abang yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan kepada saya selama menjalani kuliah.
11. Teman teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pembaca.

Yogyakarta, 9 November 2021



Ghitha Nabilah Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
NOTA DINAS v
LEMBAR PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ..... **Error! Bookmark not defined.**
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxiv
DAFTAR GAMBAR xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Sistematika Penulisan 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Telaah Pustaka 7
B. Landasan Teori 10
1. Coronavirus dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi serta UMKM **Error! Bookmark not defined.**
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah upaya bertahan pada masa pandemi **Error! Bookmark not defined.**
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi pengusaha mikro 19
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Desain Penelitian 26
B. Lokasi Penelitian 26

C. Waktu Penelitian 26
D. Obyek Penelitian 26
E. Sumber Data 27
F. Teknik Pengumpulan Data 27
G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 28
H. Instrumen Penelitian 32
I. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Objek Penelitian 37
B. Hasil Penelitian 45
C. Pembahasan 57
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase dampak Covid-19 terhadap UMKM .. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Identitas Responden 27

Tabel 3.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 28

Table 3.3 Pedoman Wawancara 32

Tabel 4.1 Hasil Penelitian 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebagai sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui, kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus atau dalam sebutan ilmiahnya disebut sebagai *Covid-19*. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan, cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini. Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai Pandemi Global (Dong et al., 2020).

Dalam kondisi saat ini, pandemi Covid-19 bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat yang diakibatkan oleh Mobilisasi penduduk di dunia yang memiliki konektivitas yang tinggi menyebabkan pandemi yang terjadi saat ini terus menyebar hingga seluruh dunia terkena dampak dari pandemi ini, termasuk Indonesia. Melansir data dari laman Covid-19.go.id, saat ini (09/12/2021) total kasus Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 4.258.560 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.109.364 pasien telah sembuh, dan 143.918 orang meninggal dunia. Antisipasi yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home)*, bahkan kegiayan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebutkan pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang

cukup besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada UMKM dengan risiko serius dimana lebih dari 50% UMKM tidak akan bertahan beberapa bulan ke depan.). Ambruknya UMKM secara luas dapat berdampak kuat pada nasional ekonomi dan prospek pertumbuhan global. Dimana hal tersebut bisa dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Menurut Febrantara (2020) dan OECD (2020) Dari sisi penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal itu terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu Covid-19 masih ada. Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UMKM tidak dapat berfungsi oprimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UMKM tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak (Sugiri, 2020). Berikut persentase dampak Covid-19 terhadap UMKM.

Tabel 1.1 Persentase dampak Covid-19 terhadap UMKM

Dampak	Persentase (%)
Penurunan Penjualan	56,0
Kesulitan Permodalan	22,0
Hambatan distribusi produk	15,0
Kesulitan bahan baku	4,0

Sumber: Setiawan (2020b) dan Kemenkop-UKM (2020)

Kebanyakan sektor UMKM yang terkena dampak *COVID-19* bergerak pada bidang kebutuhan sehari- hari, yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa UMKM yang bergerak pada bidang industri kreatif dan pertanian juga paling terdampak pada pandemi *COVID-19*. Para pengelola UMKM merasakan turunnya penjualan, terhambatnya distribusi, dan kekurangan modal usaha.

Dimana bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung fenomena yang terjadi saat ini karena besarnya pengembalian yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Nugroho & Tamala, 2018). Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan syariah seharusnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, maka diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM.

Dalam hal ini untuk memecahkan persoalan yang menyangkut dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan mikro seperti BPRS merupakan salah satu model lembaga keuangan Syariah yang paling sederhana yang bergerak di kalangan masyarakat bawah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlunya penelitian terhadap peran BPRS untuk membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan baik untuk modal tetap, modal usaha, maupun restrukturisasi pembiayaan yang sangat membantu dalam keberlangsungan perekonomian yang berbasis syariah, dalam proses penyaluran pembiayaan atau permodalan pada usaha-usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha kecilnya. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kemslahatan umat, sesuai tujuan utama ekonomi Syariah adalah peningkatan kesejahteraan sesuai syariat Islam.

PT BPRS Formes Yogyakarta merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam dengan visi misinya yakni menjadikan penyedia jasa keuangan Syariah yang terkemuka dan profesional dimana dalam waktu 3

(tiga) tahun terakhir, PT BPRS Formes mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari permodalan maupun jumlah asset yang terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa PT BPRS Formes semakin dipercaya oleh nasabah dan masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik serta menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan tata Kelola usaha yang baik. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh BPRS Formes Yogyakarta dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta dalam membantu mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan selama melakukan penelitian, selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kurikulum dan dapat digunakan sebagai pijakan

dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran BPRS dalam menanggulangi dampak Covid-19 terhadap UMKM.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi BPRS Formes Yogyakarta

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan acuan untuk bahan evaluasi kepada pihak BPRS.

   b. Bagi Prodi Ekonomi Islam

      Menjadi bahan acuan untuk mengembangkan layanan dengan mengurangi dan mengoreksi kekurangan, menambah wawasan mengenai kinerja BPRS dalam menanggulangi dampak Covid-19 terhadap UMKM secara praktikal.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi telaah pustaka penelitian terdahulu dan landasan teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Serta dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian pustaka, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data primer atau sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis pembahasan data sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atau pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Serta memuat saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya dan perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah terdahulu, maka diperlukan tinjauan kajian terdahulu, yang dalam hal ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

Pertama, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Harisah Romaji (2021) dengan judul "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak virus corona terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Karena melihat akibat dari virus corona ini terjadi penurunan yang sangat drastic dari beberapa aktivitas ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder. Kajian ini menemukan bahwa dampak virus corona terhadap perekonomian sangat memberikan nilai negative, seperti penurunan tingkat perekonomian masyarakat, dan perekonomian Negara. Maka dari itu, untuk memulihkan Kembali krisis ekonomi di Indonesia disebabkan covid-19 lembaga keuangan syariah melakukan beberapa cara untuk memulihkan krisis ekonomi tersebut dengan merangkul para pelaku UMKM yang ada di Indonesia dengan memberikan modal kepada pelaku ekonomi.

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Achmad Rifa'I (2017) dengan judul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM". Hasil penelitian ini adalah keuangan inklusif diusung untuk menjawab permasalahan tentang pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah melalui pendalaman akses keuangan terutama terhadap masyarakat menegah bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selaku perpanjangan tangan Lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi *intermediatory institution* dalam mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memeratakan akses keuangan di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan untuk melihat peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan tugasnya dalam pembiayaan UMKM sebagai upaya untuk mencapai keuangan inklusif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi (2019) dengan judul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran serta kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil dari penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebatas penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya ataupun mengembangkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sri Maryati (2014) dengan judul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Argibisnis Pedesaan di Sumatera Barat". Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisa peran BPRS dalam pengembangan usaha UMKM pada umumnya dan argibisnis pedesaan khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan Kerjasama antara pemerintah daerah dan Lembaga keuangan untuk mengembangkan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan permodalan dan pengembangan usaha secara terus menerus. Pelaku usaha juga harus berusaha mengelola usaha dengan lebih professional dan memenuhi aspek legalitas usaha agar memudahkan bagi pihak pemerintah maupun Lembaga keuangan untuk melakukan berbagai usaha pemberdayaann dan bantuan permodalan. Kajian ini menggunakan metode Analisa deskriptif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*).

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Singgih Muheramtohadi (2017) dengan judul "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia". Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya

diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, Sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Pembiayaan kepada UMKM ini tidak lepas juga dari pengaruh Grameen Bank sebelumnya, yang telah berdiri sejak medio 1970-an. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syarah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaan nya. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun Lembaga Keuangan (perbankan).

Keenam, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fatoni (2017) dengan judul "Analisis Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan sebagai peberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah apakah membantu dalam keberlangsungan jalannya para pelaku UMKM, Keberadaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat kecil karena dapat dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi berkembang dari sebelumnya yang sering disebut dengan system pembiayaan sehingga dengan adanya pembiayaan ini, dianggap mampu memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Abrista Devi (2021) pada penelitian yang berjudul "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi

Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor". Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani memiliki peran penting untuk menjaga UMKM pada masa pandemic *Covid-19*. Peranan yang dilakukan diantaranya adalah membantu penyaluran program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat); memberikan keringanan terhadap pengusaha yang merasakan dampak pandemi *Covid-19*, dan memberikan fasilitas pembiayaan bagi pengusaha seperti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan PJOK Nomor 11 Tahun 2020.

Hal serupa juga dibahas pada penelitian Andi Cahyono, Erwin Siregar, dan Asiah Wati (2021) mengenai "Peran Bank Syariah pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dana sosial yang terdapat pada bank Syariah terhadap UMKM yang terdampak dengan pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran yang dilakukan bank Syariah pada masa pandemi meliputi memberikan bantuan sosial kepada UMKM untuk memenuhi kebutahan sehari-hari, memberikan program restrukturisasi atas pembiayaan baru maupun pembiayaan yang telah berjalan, pelatihan usaha mikro berbasis teknologi, dan yang terakhir membentuk komunitas pengusaha mikro guna membuka akses bagi para pengusaha mikro itu sendiri.

B. Landasan Teori

1. Upaya UMKM bertahan pada masa pandemic

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM memiliki pengertian yang berbeda-beda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau Lembaga dan undang-undang. Dalam undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No.20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 Tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa:

1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorang yang memenuhi kriteria yakni: memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

2) Usaha Kecil, usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00. sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.
3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

   Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Selain terdapat dalam Undang-Undang, definisi dari Kementerian Keuangan dan beberapa Lembaga yang juga memberikan definisi masing-masing mengenai UMKM, di antaranya yaitu:

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa usaha kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan / usaha yang memiliki penjualan atau omset pertahun setinggi-tingginya Rp600.000.000,00 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp600.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati).

2) Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS UKM adalah usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

3) Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mendefinisikan UKM adalah perusahaan atau industry dengan karakteristik berupa modal kurang dari Rp20.000.000,00 untuk satu putaran usaha hanya membutuhkan dana Rp5.000.000,00 memiliki asset maksimum Rp600.000.000,00 juta diluar tanah dan bangunan, omzet tahunan ≤ Rp1 miliar.

4) Keppres No. 16/1994

Menurut Keppres UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp400.000.000,00.

5) Departemenn perindustrian dan perdagangan

a) Memiliki asset maksimum Rp600.000.000,00 juta diluar tanah dan bangunan (departemen perindustrian sebelum digabung).

b) Memiliki modal kerja dibawah Rp25.000.000,00 (departemen perdagangan sebelum digabung).

Jadi, bisa dikatakan pengertian dari usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Karakteristik UMKM di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di antara negara-negara yang ada di Asia. Terdapat beberapa karakteristik UMKM pada negara berkembang. Dalam beberapa literatur diakui secara luas bahwa di negara sedang berkembang UMKM sangat penting karena beberapa karakteristiknya yang berbeda dengan usaha besar, di antaranya yaitu :

1) Jumlah perusahaannya lebih banyak dari usaha besar, kebanyakan usaha UMKM tersebar di seluruh pedesaan. Oleh karena itu, jenis usaha UMKM ini berperan meningkatkan perekonomian pedesaan.
2) Karena sangat padat karya, berarti UMKM mempunyai potensi kesempatan kerja yang sangat besar, untuk itu pemerintah harus memperjuangkan kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja terutama bagi masyarakat miskin.
3) UMKM yang berlokasi di pedesaan kegiatan produksi pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, pemerintah mendukung UMKM agar lebih efektif dalam pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
4) UMKM memakai teknologi yang tradisional, jika dibandingkan dengan usaha besar yang memakai teknologi canggih.
5) Banyak UMKM yang bisa tumbuh pesat, bahkan banyak UMKM yang bisa bertahan ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997. Oleh sebab itu, UMKM dianggap sebagai basis bagi perkembangan usaha besar.
6) Meskipun masyarakat pedesaan pada umumnya miskin, banyak bukti yang menunjukkan orang pedesaan mau menabung dan berinvestasi mengambil risiko dengan menjalankan sebuah usaha. Pada waktu yang bersamaan, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
7) Sebagian besar pengusaha UMKM membiayai usaha mereka dengan tabungannya sendiri ditambah dengan bantuan pinjaman dari saudara atau kerabat terdekat (Tambunan, 2009).

Sedangkan Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.

1) UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.

2) Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut Pendidikan formal tertentu
3) Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar
4) Dan yang terakhir UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

c. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Resalawati (2011):

1) *Livelhood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

d. Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Terdapat beberapa permasalahan bagi para pelaku UMKM baik yang berlokasikan di pedesaan ataupun di perkotaan, yakni:

1) Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran umum yang dialami UKM adalah tekanan-tekanan persaingan.

2) Kesulitan Pengadaan Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia.

3) Kekurangan Modal

UKM di Indonesia menghadapi masalah utama yaitu keterbatasan modal kerja. Kebanyakan modal awal para pelaku usaha bersumber dari modal (tabungan) sendiri, sehingga permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Kurangnya informasi mengenai prosedur peminjaman, bahkan suku bunga pinjaman yang tinggi membuat para pelaku usaha lebih memilih menggunakan modal sendiri.

4) Kesulitan Membayar Pekerja

Penghasilan dalam menjalankan usaha menjadi salah satu bagian dari kelangsungan suatu usaha. Jika barang produksi tidak laku dipasaran maka akan mengakibatkan turunnya omset penjualan sehingga dalan memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk membayar karyawannya terhambat. Ditambah lagi Ketika UMR naik namun penghasilan dari usaha tersebut tidak mengalami peningkatan maka akan membuat usaha tersebut terancam gulung tikar.

e. Upaya untuk bertahan pada masa pandemi

Pandemi Covid-19 mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan. Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan UMKM adalah seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), banyaknya usaha lokal yang harus ditutup pada Kawasan pariwisata yang menyebabkan dirumahkannya para karyawan. Situasi ini mengakibatkan keberadaan UMKM seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena UMKM

merupakan penggerak utama perekonommian bangsa dan penyumbang PDB terbesar negara.

Di masa pandemi Covid-19 ini, UMKM masih bisa berupaya untuk tetap menjalankan usahanya yaitu dengan mengembangkan produknya. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran dan menekan biaya promosi. Dengan diterapkannya *social distancing*, *work from home* (WFH) dan anjuran untuk tidak keluar rumah oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, menyulitkan para pengusaha untuk melakukan transaksi jual beli secara tatap muka dan menyebabkan penurunan jumlah konsumen. Hal ini merupakan kesempatan bagi para pengusaha UMKM untuk tetap bertahan dengan meningkatkan penjualannya secara online. Untuk itu, para pengusaha kini harus pandai dalam memanfaatkan teknologi yang ada terutama media sosial guna mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM dituntut untuk tetap dapat memasarkan produknya secara online dengan memanfaatkan media sosial yang ada untuk dapat secara langsung menjangkau konsumen dan target pasar baru.

2. Pemberdayaan UMKM pada masa pandemi

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalan arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program (Habib, 2021; Maryani & Nainggolan, 2019). Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan semakin tingginya partisipasi UMKM yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional. UMKM adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Pandemi yang terjadi pada saat ini memberikan pengaruh negatif yang cukup besar terhadap UMKM, namun tidak sedikit juga para pelaku

UMKM yang sudah beradaptasi dan membuat usahanya masih berjalan dan bahkan sampai membuka cabang. Maka dari itu ada beberapa hal yang bida dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM untuk tetap mempertahankan usahanya, dengan cara berikut:

a. Mengembangkan produk melalui *E-Commerce*

Pada era pandemi Covid-19 terdapat beberapa UMKM yang mengalami penurunan omzet yang disebabkan karena masyarakat yang berdiam diri di rumah. *E-commerce* bisa menjadi salah satu harapan untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha UMKM karena pada era ini banyak masyarakat yang sudah menggunakan *handphone* atau *gadget*. Pada revolusi industry 4.0 *e-commerce* menjadi salah satu cara untuk memperluas jaringan penjualan dari *gadget.* Salah satu contoh *e-commerce* yang bisa digunakan para pelaku UMKM salah satunya ialah Shopee dan Lazada (Hardilawati, 2020). Dengan *e-commerce* para pelaku usaha bisa mudah untuk berkomunikasi dengan para pemasok bahan baku, hubungan dengan pelanggan ataupun menganalisis apa yang sedang *trend* di pasar. *E-commerce*ini bisa bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis, menaikan keuntungan dan memperluas pasar serta dapat meningkatkan konsumen baru. Dari *e-commerce* juga bisa memasarkan barang dagangan lebih efektif dan bisa melakukan observasi pada penjualannya agar lebih bisa mengembangkan bisnis kedepannya.

b. Mempromosikan produk dengan *Digital Marketing*

Pada era pandemic Covid-19 *digital marketing* sangat penting dilakukan karena adanya revolusi industry 4.0 yang setiap individu harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. *Digital marketing* ialah cara promosi suatu produk yang menggunakan media online atau elektronik (Hardilawati, 2020). *Digital marketing* bisa menggunakan berbagai *e-commerce* seperti Shopee, Lazada maupun Go-jek dan bisa menggunakan sosial media

seperti *Instagram, Whatsapp* maupun *Facebook.* Pelaku UMKM dapat mempromosikan produknya melalui sosial media dengan menggunakan sebuah video agar masyarakat luas dapar mengetahui produk yang dipasarkan. Kemudian memanfaatkan sebuah iklan pada aplikasi untuk mempromosikan produk tersebut seperti pada *Facebook ads* ataupun yang lainnya. Bisa juga melakukan sebuah *live* produk pada akun sosial media perusahaan tersebut.

c. Mempertahankan *Costumer Relationship Marketing (CRM)*

Setidaknya pada era pandemi Covid-19 ini para pelaku UMKM tidak hanya berfokus pada sisi *marketing* ataupun pemasarannya saja, namun juga harus berfokus pada kepuasan pelanggan yang bisa menimbulkan loyalitas pelanggan terhadap produk yang dijual. CRM ialah sebuah proses dari perusahaan untuk melakukan pemasaran dalam hubungan jangan Panjang dengan para pelanggan. *CRM* juga saling menguntungkan pada penyedia jasa yang dapat membagun transaksi secara berulang dan menciptakan keloyalitasan pelanggan.

Dengan adanya strategi pemasaran seperti ini para pelaku usaha bisa menerapkannya dengan cara memberi promo, diskon ataupun gratis ongkir pada pelanggan agar bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan pada usaha tersebut, bisa juga memberi sedikit keuntungan pada yang membutuhkan seperti mengadakan acara membagikan sembako atau nasi kotak di sekitar usaha. Dengan adanya ini pelanggan bisa melihat kepedulian pelaku usaha tersebut terhadap sesama dan bisa menimbulkan keloyalitasan yang tinggi terhadap usaha UMKM tersebut.

d. Memperbaiki kualitas dan pelayanan produk maupun jasa

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini para pelanggan menjadi lebih berhati-hati untuk menggunakan jasa atau produk dari UMKM karena khawatir tertipu dari pelaku usaha tersebut. Pelaku UMKM dapat memperbaiki kualitas dan juga pelayanan pada pelanggan agar

terciptanya rasa kepercayaan pada produk ataupun jasa yang diberikan. Memperbaiki kualitas produk maupun jasa bisa berbentuk menjaga ketahanan dan keamanan produk yang diperjual belikan dengan cara mengkontrol setiap produk. Kemudian bisa menambah kekuatan dalam kemesan agar produk yang dijual bisa awet dan tahan lama dalam masa pengiriman, hingga sampai pada pelanggan dengan keadaan sesuai harapan. Selanjutnya memperbaiki pelayanan pada pandemi seperti ini bisa berbentuk menambah pelayanan pengantaran melalui jasa transportasi seperti Go-jek dan Grab yang sudah dijamin keamanan dan kebersihannya. Masyarakat masih ada yang belum bisa percaya sepenuhnya, namun dari pihak pelaku usaha bisa memastikan bahwa kebersihan dan keamanan produk tersebut bisa sampai dengan selamat. Sebab dalam era pandemic seperti ini kepercayaan pelanggan menjadi alas an utama tetap berjalannya usaha tersebut.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi pengusaha mikro

a. Dasar dan Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan dengan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah.[1] Selain itu BPRS juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dari segi penamaan sudah terlihat berbeda, dilihat dari sisi penggunaan istilah Pembiayaan dengan Perkreditan. BPRS menggunakan istilah pembiayaan

dikarenakan kata kredit sering digunakan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sedangkan pada bank yang menggunakan system Syariah tidak menggunakan istilah kredit akan tetapi menggunakan istilah pembiayaan. Kegiatan usaha yang dijalankan BPRS mencakup pendanaan (tabungan dan deposito) serta pembiayaan (peminjaman) yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Dari segi jenis kegiayan usaha, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah, mudharabah,* atau akad lain seperti *mudharabah* untuk produk deposito berjangka yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua jenis penghimpunan dana ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik berdasarkan akad jual beli (*murabahah, salam,istishna'*), sewa menyewa (*Ijarah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), prinsip *tabaru'* (*qordh*) dan pengambilalihan hutang (*hiwalah*).
3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinip syariah seperti layanan *Automated Teller Machine* (ATM), kas keliling dan lain sebagainya setelah mendapat persetujuan dan izin dari OJK.

BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS, sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
c. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali pennukaran uang asing dengan izin BI.
d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
f. Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
g. Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI atau sekarang OJK.

Berdasarkan POJK.03/2016, badan hukum usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT.). pendirian BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh *Pertama* warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. *kedua* pemerintah daerah. *Ketiga* kerjasama kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua.

b. Tinjauan dan Karakteristik BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4) Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena

sektor *real* akan bergairah.

c. Produk-produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

1) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

2) Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi'ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau mudharabah dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

2) Pembiayaan Mudharabah

pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

3) Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

4) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah.

5) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusha.

d. Kegiatan Usaha BPRS

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertenatangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
   a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah.*
   b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam*, atau *istishna'*.
   c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
   d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
   e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
3) Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.
5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

BAB III
METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Desain penelitian disebut juga metode penelitian yang menggambarkan suatu prosedur atau teknik dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya (Nurwantoro, 2019). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat dalam dua variabel kasus yang kemudian dicari titik korelasinya. Korelasi tersebut bisa dalam bentuk mengkonfirmasi, menolak, dan sependapat berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan studi kepustakaan merupakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur baik dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, *working paper*, maupun sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam kajian ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Formes Yogyakarta yang berlamat di Jl. Gito Gati KM.1, Grojogan, Pandowoharjo, Banaran, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu dari pengajuan judul dan pembuatan proposal, seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan pencarian data lalu dengan tahapan akhir yaitu menyimpulkan data hasil dan penyusunan laporan. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Oktober 2021.

d. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran BPRS Formes Yogyakarta terhadap UMKM di Yogyakarta. dari Pandemi Covid-19.

e. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data Primer dan sumber data Skunder.

1) Sumber data Primer Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2009: 122). Data primer ini diperoleh dari kegiatan wawancara bersama beberapa perwakilan karyawan BPRS Formes Yogyakarta yang terpilih sebagai informan, terdiri dari empat responden yakni:

Tabel 3.1 Identitas Responden

No.	Nama	Posisi	Usia	Pendidikan
1.	Eva Esti Rahayu	Staff Financing dan Funding	25th	S1 Ekonomi Syariah
2.	Agustina Widyaningsih	Deskmen Pembiayaan dan Personalia	36th	S1 Ilmu Hubungan Internasional
3.	Dwi Wulaningsih	Akunting dan Pelaporan	34th	S1 Manajemen
4.	Noor Latifah DF	Deskmen Pembiayaan dan Personalia	31th	D3 kesehatan lingkungan

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara, dengan wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Tabel 3.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Peran BPRS	Peran BPRS adalah Sebagai lembaga kepercayaan khususnya bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank, pengawasan dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya ataupun mengembangkannya, serta saran dan nasehat yang membangun (Fauzi, 2019).	**1. Sistem Pengawasan** Pengawasan mempunyai pengaruh yang kuat dan bernilai positif serta signifikan terhadap efektivitas. Pentingnya peran pengawasan akan sangat berdampak pada perkembangan UMKM (Nathania, 2019). **2. Kendala** Hambatan dalam penyaluran yang dapat ditimbulkan baik dari internal maupun eksternal	**1. Sistem Pengawasan** a. Pihak yang melakukan pengawasan b. Penataan penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM c. Evaluasi peran dan upaya penanggulangan dampak Covid-19 **2. Kendala** a. Hambatan dalam penanggulangan dampak Covid-19

		(aspek nasabah) (Yudistira, 2019). **3. Kualitas Pelayanan** Tindakan suatu perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kualitas pelayanan dianggap sebagai filosofi utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan jika tetap ingin memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Rafidah, 2014).	b. Penipuan yang dilakukan nasabah **3. Kualitas Pelayanan** a. Perhatian terkait kebutuhan dan keinginan
Penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM	Penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM menurut pemerintah melalui OJK telah menerbitkan POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan , termasuk	**1. Pembiayaan UMKM** Mendukung peningkatan kinerja UMKM yang digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha (Susilo, 2010).	**1. Pembiayaan UMKM** a. Jumlah UMKM b. Jenis UMKM c. Syarat pembiayaan d. Pembiayaan yang ditawarkan **2. Analisis Pembiayaan**

	perbankan syariah di dalamnya yaitu memberikan kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah sektor UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah (kusjuniati, 2020).	**2. Analisa Pembiayaan** Elemen penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kegiatan analisis meliputi kegiatan pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis (Erlindawati, 2017). **3. Studi kelayakan**	a. Pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan b. Cara perhitungan pembiayaan yang disalurkan **3. Studi Kelayakan** a. Kondisi UMKM

		Menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Sunyoto, 2014).	

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Recorder

Akan digunakan untuk merekam suara ketika wawancara sedang berlangsung.

b. Kuesioner

Membagikan *Google Form* sebagai media untuk membantu mempermudah proses wawancara

c. Pedoman wawancara

Panduan dalam melakukan kegiatan wawancara terstruktur yang telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian. Adapun Poin-poin penting yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber adalah sebagai berikut:

Table 3.3 Pedoman Wawancara

ASPEK	PERTANYAAN
Sistem Pengawasan	1. Apakah semua pihak melakukan pengawasan terhadap kasus ini atau hanya pihak tertentu? 2. Untuk bagian marketing yang melakukan *controlling* langsung, apakah ada peran khusus yang harus dilakukan terhadap penanggulangan dampak *Covid-19* UMKM? 3. Sejauh ini peran dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 4. Bagaimana cara BPRS Formes Yogyakarta melakukan penataan terhadap UMKM? 5. Apakah BPRS Formes Yogyakarta sudah

	melaksanakan perannya secara maksimal? 6. Bagaimana evaluasi peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta yang sudah dilakukan sampai saat ini, dan apa rencana ke depan?
Kendala	1. Apa saja hambatan yang dirasakan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 2. Apakah ada nasabah yang nakal seperti berbohong atau melakukan penipuan?
Kualitas Pelayanan	1. Bagaimana pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam memberikan perhatian kepada nasabah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginannya?
Pembiayaan UMKM	1. Selama pandemi berlangsung ada berapa banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta? 2. UMKM bidang apa yang melakukan pembiayaan di masa pandemic *Covid-19*? 3. Apakah ada syarat tertentu atau syarat lain saat melakukan pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*? 4. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam rangka menanggulangi dampak dari Covid-19?
Analisa Pembiayaan	1. Apa yang diperhitungkan pertama kali untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah? 2. Bagaimana cara perhitungan kisaran dana pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah? 3. Sampai saat ini berapa biaya terbesar yang dikeluarkan Bank

	dalam menangani dampak *Covid-19* terhadap UMKM?
Studi Kelayakan	1. Kondisi UMKM yang seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta?

I. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (sering kali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat pertisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi Tindakan ini tidak selalu bijaksana.

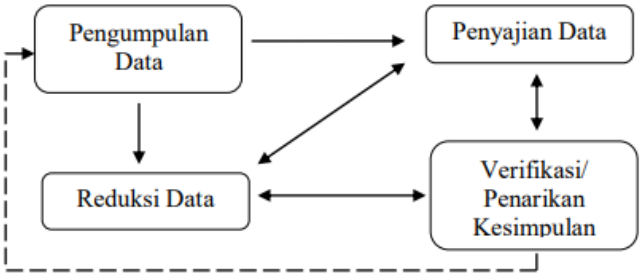
b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses penngumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan

model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Dikutip dari buku Metodologi Penelitian Sosial Agama 2003, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak:

a. Peneliti mengumpulkan data dari penelitian lapangan, baik primer maupun sekunder pengumpulan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
b. Melakukan pemilihan data (reduksi data) yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam hal ini ditujukan untuk mngetahui bagaimana peran BPRS dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta.
c. Kemudian melakukan penyajian data (display data) yang dapat dicapai apabila telah memenuhi kriteria tertentu.

Terakhir peneliti menarik kesimpulan/verifikasi dan memberikan saran (Suprayono, 2003: 195).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Data Perusahaan
   a. Nama Perusahaan : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH FORMES
   b. Alamat Perusahaan : Jalan Gito Gati Km.1 Grojogan, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta.
   c. Ijin Operasional
      Nomor : 10/86/KEP.GBI/DpG/2008
      Tanggal : 23 Desember 2008
   d. E-mail : formesbprs@gmail.com
   e. Website : http://bprsformes.com/

2. Sejarah BPRS Formes

Tahun 2009 menjadi tahun yang menghadirkan banyak peluang bagi industry perbankan syariah untuk melakukan ekspansi pasar. Tingkat awareness masyarakat yang semakin tinggi terhadap system perbankan alternative yang berlogo iB ini, sebagai hasil dari sosialisasi secara intensif oleh regulator selama tiga tahun belakangan, pada tahun 2009 memasuki tahap siap untuk mencoba berbagai kelebihan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Ibarat buah yang mulai ranum, antusiasme masyarakat ini siap dipetik oleh bak-bank syariah yang jeli dan sigap menangkap peluang pasar. Dan jika itu terjadi, maka tidak mustahil iB akan melaju lebih kencang lagi dari pertumbuhannya selama ini yang telah sangat impresif mencapai 46,3% pertahun (rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir).

Pada tanggal 22 Desember 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan ijin usaha No. 10/86/KEP.GBI/DpG/2008, dengan adanya surat keputusan tersebut maka secara resmi BPRS Formes telah mendapatkan ijin operasional usaha. Pembukaan perdana PT BPRS FORMES pada tanggal 19

Januari 2009 ditandai dengan soft opening yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, yang sekarang menjabat sebagai bupati sleman Drs.H.Sri Purnomo,M.Si, Prof.DR.H Amir Mualim, M.A, Drs. H. M. Sularno, M.A dan juga Dewan Komisaris yaitu Madiyono S.E dan Toto Suparwoto, S.pd.

PT. BPRS FORMES sebagai Lembaga investasi syariah terus mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaaan baik untuk modal tetap maupun untuk modal usaha. Dalam kenyataannya para pengusaha dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi krisis sekalipun dan tetap dapat memberikan tingkat keuntungan investasi yang besar. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha yang selalu berubah, serta dengan pengolaan usaha yang sangat efisien.

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, PT. BPRS Formes mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari permodalan maupun jumlah asset yang terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa PT. BPRS Formes semakin dipercaya oleh nasabah dan masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan visinya, PT. BPRS Formes berusaha untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Alhamdulillah hingga akhir Desember 2011 total asset PT. BPRS Formes telah mencapai lebih dari 15 miliar rupiah.

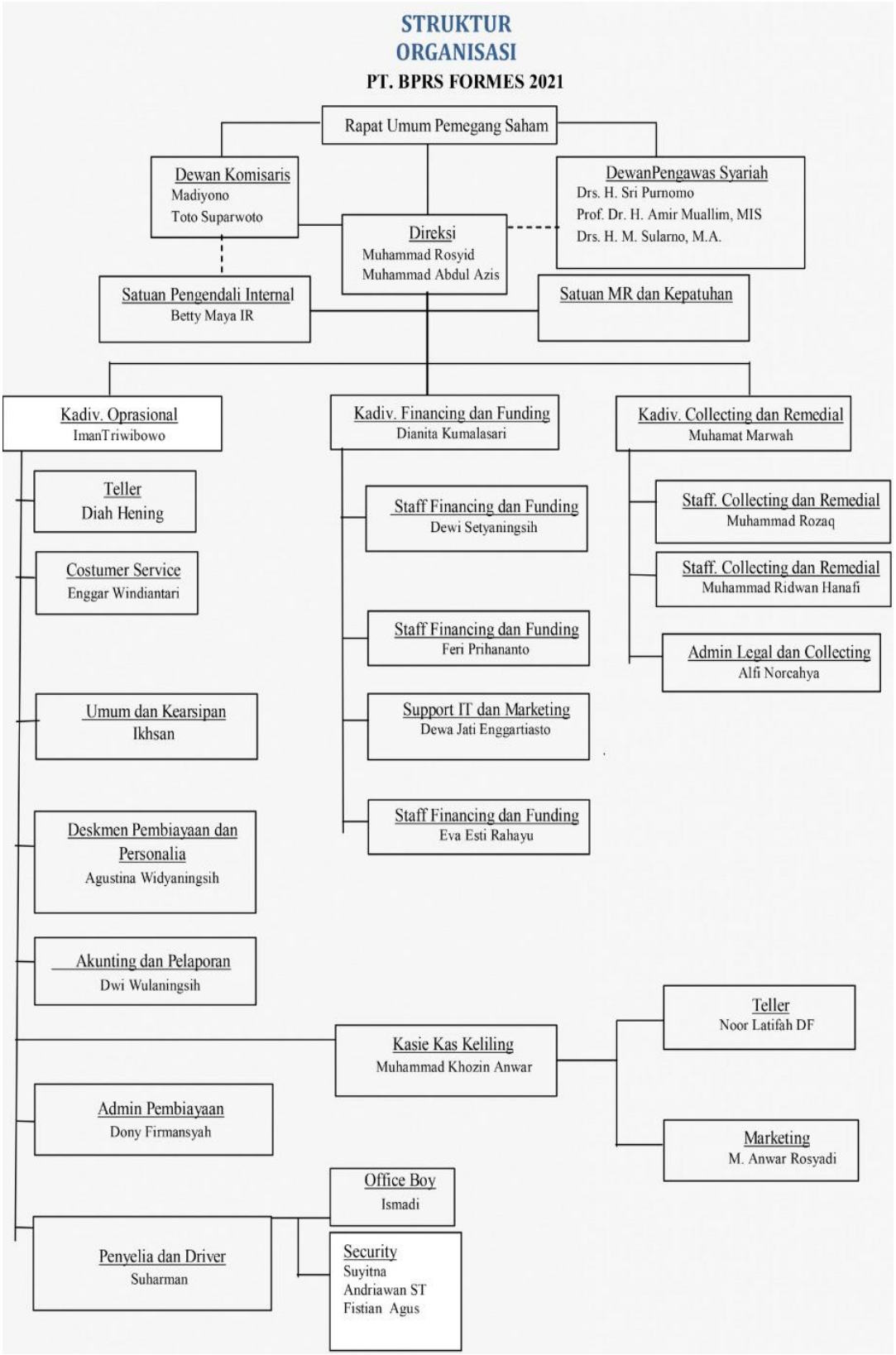
3. Visi Misi BPRS Formes Yogyakarta
   a. Visi

      Menjadikan penyedia jasa keuangan syariah yang terkemuka dan professional yang secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik.

   b. Misi
      1) Menjalankan usaha dengan hati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
3) Membekali karyawan dengan pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
4) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata Kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*).
5) Memberikan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat secara optimal.

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

5. Produk BPRS Formes Yogyakarta

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Formes antara lain sebagai berikut:

a. Produk pendanaan BPRS Formes

1) Tabungan Wadiah

Tabungan dengan akad titipan yang atas seijin nasabah dapat digunakan untuk operasional BPRS, dengan ketentuan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi berhak mendapatkan kompensasi yang nilainya ditentukan oleh BPRS.

a) Tabungan Mitra Amanah

- Tabungan khusus yang digunakan untuk fasilitas pembiayaan dari BPRS (tabungan untuk kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan).
- Penabung diberikan bonus atas keuntungan yang diperoleh BPRS.
- Tidak ada potongan setiap bulannya.
- Biaya pembukaan rekening Rp 25.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-

b) Tabungan Taman

- Tabungan yang bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu.
- Penabung diberikan bonus atas keuntungan yang diperoleh BPRS.
- Biaya pembukaan rekening Rp 10.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-

c) Tabungan Zakiah

- Tabungan untuk tujuan khusus yaitu penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh.
- Tabungan yang bisa di setor dan diambil sewaktu waktu.
- Penabung diberikan bonus atas ketentuan yang diperoleh BPRS.
- Tidak ada potongan setiap bulannya.
- Biaya pembukaan rekening Rp 10.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan dengan akad simpanan dalam bentuk investasi yang dimanfaatkan secara produktif untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan ketentuan bagi hasik atau nisbah yang nilainya disepakati pada saat pembukaan tabungan.

a) Tabungan Mabrur

- Tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah untuk tujuan khusus persiapan ibadah haji dan umroh.
- Penarikan tabungan dapat dilaksanakan pada saat menjelang pembayaran haji/umroh sesuai perencanaan nasabah
- Biaya pembukaan rekening Rp 50.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-
- Bila saldo sudah mencukupi akan dibantu proses pengurusan selanjutnya.

b) Tabungan Ulil Albab

- Tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah untuk kemudahan perencanaan keuangan masa depan persiapan biaya Pendidikan putra/i.
- Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu.
- Bagi hasil yang kompetitif dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu kemudian akan otomatis masuk simpanan kembali.
- Biaya pembukaan rekening Rp 50.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-
- Bila saldo sudah mencukupi akan dibantu proses pengurusan selanjutnya.

c) Tabungan Al-kautsar

- Tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah untuk persiapan ibadah qurban.
- Penarikan tabungan dapat dilakukan menjelang hari raya qurban, berupa uang cash/hewan qurban.
- Biaya pembukaan rekening Rp 10.000,-
- Setor pertama min. Rp 50.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 10.000,-
- Saldo min. Rp 10.000,-

d) Tabungan Sahabat

- Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah yang diperuntukan bagi lembaga atau instansi yang ingin menabung atas nama lembaga atau instansi.
- Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya dilakukan sesuai kesepakatan.
- Tabungan yang bisa di setor dan diambil sewaktu-waktu.
- Biaya pembukaan rekening Rp 100.000,-

- Setor pertama min. Rp 100.000,-
- Setoran selanjutnya min. Rp 50.000,-
- Saldo min. Rp 50.000,-

3) Deposito Mudharabah

Investasi mudharabah salam

- Investasi berjangka dari perorangan/lembaga dalam bentuk deposito yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mudharabah.
- Jangka waktu fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan (fasilitas perpanjangan otomatis atau ARO/*Automatic Roll Over*).
- Bagi hasil yang kompetitif (atas keuntungan yang diperoleh BPRS) dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Setor pertama min. Rp500.000,-
- Biaya materai Rp 10.000,-

4) Simpanan Mudharabah

SI AMIN (Simpanan Masa Depan Terjamin)

- Tabungan berjangka berdasarkan prinsip syariah mudharabah dengan jumlah setoran bulan tetap (*installment*).
- Jangka waktu/periode tabungan 1 s.d 15 tahun.
- Dapat disetorkan 1 kali setiap bulan/triwulan/semesteran secara akumulatif, dengan pilihan setoran Rp 50.000,-, Rp 100.000,-, Rp 200.000,- sesuai kesepakatan.
- Bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif (nisbah nasabah kisaran 60%-65%).
- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka Panjang.

b. Produk pembiayaan BPRS Formes

1) Murabahah iB

   Pembiayaan untuk beli barang (rumah, tanah, mobil, alat produksi dan sejenisnya)

2) Ijarah iB

   Pembiayaan untuk sewa (sewa lahan usaha, sewa tempat usaha dan sewa alat produksi)

3) Musyarakah dan mudharabah iB

   Pembiayaan untuk mengembangkan usaha (modal perusahaan)

4) Ijarah multi jasa iB

   Pembiayaan untuk jasa-jasa (biaya rumah sakit, biaya menikah dan lain-lain)

5) Qord

   Pembiayaan pinjaman

B. Hasil Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan studi eksploratif melalui telepon dengan pendekatan wawancara terstruktur. Wawancara via telepon telah digambarkan sebagai cara paling aman untuk mendapatkan informasi selama masa pandemic *Covid-19* dan respons yang baik juga akan diperoleh. Sebagaimana yang dikemukakan pada bab 1 bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta dalam membantu mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta. Adapun untuk mecapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menguraikan ke dalam beberapa poin berikut:

1. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan, proses yang di lakukan dalam melakukan pengawasan sangat penting. Proses pengawasan sendiri

adalah melakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi atau perbaikan terhadap kinerja dan aktivitas yang diawasi (Baehaqi, 2014).

Menurut hasil wawancara secara umum sistem pengawasan dilakukan oleh semua bagian organisasi yang terdapat di BPRS Formes Yogyakarta tetapi bagian marketing memiliki tanggugjawab besar dalam melakukan pengawasan langsung. Hal ini bertujuan agar sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif maka harus diperhatikan kedudukan lembaga dalam struktur organisasi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan bidang marketing adalah dengan cara *monitoring*, dimana sistem monitoring ini dilakukan setiap bulan dengan pembagian jumlah marketing dibagi dengan banyaknya UMKM belum termasuk UMKM yang kolektif atau UMKM macet.

Selain melakukan pengawasan, cara BPRS Formes Yogyakarta dalam melakukan penataan terhadap UMKM di Yogyakarta adalah:

- melakukan doa bersama seluruh karyawan yang dilakukan setiap apel pagi sebelum mulai bekerja, mendoakan agar nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta dipermudah usahanya, diberikan kelancaran dalam mengangsur.
- mendengarkan apa saja yang menjadi keluh kesah UMKM tersebut dan dicarikan solusi yang membangun. Salah satu contohnya adalah UMKM yang sangat terdampak dengan pandemi *Covid-19* dan tidak bisa melakukan angsuran sejumlah yang diharuskan, maka pihak BPRS Formes Yogyakarta akan merekomendasikan restruck pembiayaan atau memberikan keringan untuk membayar angsuran pembiayaan.
- Bentuk sosial seperti memberikan bantuan sembako bagi UMKM yang dapat mengangsur dengan lancar dan juga memiliki riwayat yang baik, bantuan sembako.

Segala bentuk peran dan upaya yang dilakukan BPRS untuk mendukung pendanggulangan dampak *Covid-19* tentu masih terdapat kekurangan. Dimana pihak BPRS Formes Yogyakarta akan terus berusaha dengan melakukan evaluasi sistem seperti tetap melakukan monitoring

terhadap perkembangan usaha nasabah dan selalu menjalin komunikasi baik secara intensif.

2. Kendala

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mecapai kinerja yang lebih tinggi (3723BAB2). Bagi lembaga jasa keuangan, semakin besarnya jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan ke berbagai sektor perekonomian akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung. Adapun beberapa kendala yang harus ditanggung salah satunya berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah:

a. Nasabah kurang mengerti soal digitalisasi

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah mulai dari *Social distancing, Lockdown,* PSBB, dan PPKM yang tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya Pandemi *Covid-19* melahirkan kebiasaan baru bagi masyarakat yakni meminimalisir kontak langsung. Karena itu, peran teknologi sangat membantu masyarakat saat ini. Tetapi disamping itu, terdapat kendala terhadap sistem digitalisasi marketing, salah satunya adalah faktor eksternal dimana Sebagian besar nasabah masih dikatakan belum sempurna pemahamannya mengenai teknologi. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia nasabah rata-rata diatas 25 tahun. HAL. 72 eka rahayiu

b. Pelaku UMKM positif *Covid-19*

Strategi pemasaran produk-produk BPRS Formes Yogyakarta ialah dengan menggunakan metode *door to door*. Dimana strategi *door to door* ini dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung nasabah atau calon nasabah sehingga petugas dengan leluasa menjelaskan produk dan sistem opersionalnya dan lebih memahami karakter setiap nasabah atau calon nasabah. Oleh adanya sistem manual atau tradisional menuju digital

mengakibatkan beberapa problem yang kemudian dihadapi oleh pihak bank tersebut salah satunya adalah tidak melakukan kontak langsung terhadap nasabah karena terpapar *Covid-19* yang berdampak pada sulitnya monitoring yang dilakukan bank terhadap nasabah.

c. Nasabah meninggal akibat *Covid-19*

Dalam kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini, tentu terdapat kasus dimana nasabah yang sedang terikat akad pembiayaan mengalami musibah lain seperti terpapar virus hingga meninggal dunia akibat *Covid-19.* Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh karyawan BPRS Formes Yogyakarta, penanganan mengenai kasus tersebut adalah pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut sudah diasuransikan. Biasanya pihak BPRS Formes Yogyakarta banyak menjalin kerjasama dengan asuransi jiwa JMA. Dimana asuransi JMA ini dapat menutupi pembiayaan yang dilakukan almarhum sebesar 50% dan sisanya akan ditanggung oleh pihak keluarga nasabah.

d. Lamanya masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Tanggal 3-20 Juli 2021 merupakan periode pertama kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19. OJK meminta pelaku sektor jasa keuangan di perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal untuk mengikuti penerapan PPKM darurat ini. Namun berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian, salah satunya adalah penyaluran pembiayaan yang tidak bisa berjalan optimal seperti biasanya. Hal tersebut disebabkan oleh aturan pemerintah untuk menyesuaikan jam kerja serta pembatasan mobilitas pegawai sesuai ketentuan. BPRS merupakan unit usaha yang mengandalkan transaksi harian, kecenderungan *work from home* itu membuat orang tidak prefer melakukan aktivitas di luar rumah sehingga akan berdampak langsung dengan likuiditasnya.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang baik akan menentukan sikap nasabah dalam menilai, memutuskan sekaligus memberikan kesan terhadap pelayanan yang diberikan, karena sering kali konsumen yang merasa puas akan cenderung lebih loyal terhadap perusahaan itu (wahab, 2017). Selain keandalan atau kemampuan bank untuk melaksanakan pelayanan secara cepat dan ketanggapan untuk membantu nasabah, bentuk pelayanan yang diberikan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid*-19 adalah dengan memberikan empati kepada nasabah yaitu berupa perhatian seperti mendengarkan kebutuhan para nasabah salah satunya terkait kemampuan dalam mengangsur pembiayaan, melakukan monitoring rutin terhadap usaha nasabah apakah usaha berkembang atau memiliki kendala.

Sebagai suatu lembaga keuangan yang bergantung pada kepercayaan masyarakat, rasa percaya nasabah terhadap bank akan mempengaruhi nasabah dalam mengambil sebuah keputusan agar nasabah merasa aman dan nyaman selama bertransaksi di dunia perbankan. Kinerja bank merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya nasabah. Berdasarkan hasil wawancara pada masa pandemi saat ini BPRS Formes Yogyakarta memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor seperti:

i. Rasio NPF rendah

untuk produk penghimpun dana BPRS Formes Yogyakarta bisa menyatakan bahwa *Net Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang terdapat di BPRS Formes Yogyakarta memiliki rasio yang rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja bank dalam memberikan analisis pinjaman pembiayaan tergolong tepat.

- Tingkat margin rendah

Pada produk pembiayaan, faktor yang mempengaruhi minat dan rasa percaya nasabah dapat melihat dari segi margin atau simulasi angsuran yang diberikan oleh BPRS Formes Yogyakarta.

- Terdapat lembaga penjamin

Di dalam perekonomian modern saat ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bertarung dibawahnya. Salah satu tiang penyangganya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki fungsi salah satunya adalah untuk menjamin simpanan nasabah.

- Memiliki komunikasi yang baik

  Membangun kepercayaan dan kredibilitas tidak bisa dilakukan dengan sekejap. Untuk memperkuat kepercayaan, dibutuhkan risiko untuk terbuka dengan masyarakat. Ketika kepercayaan bertimbal balik, akan ditemukan keyakinan antara kedua belah pihak sehingga dapat menciptakan kedekatan emosional yang dapat menciptakan tingkat loyalitas nasabah terhadap perusahaan.

4. Pembiayaan UMKM

Selama pandemi berlangsung, BPRS Formes Yogyakarta telah menangani setidaknya 10 UMKM perbulannya. Dimana jika dihitung hingga saat ini, jumlah UMKM yang melakukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta kurang lebih mencapai 170 UMKM. UMKM di Indonesia memiliki berbagai macam jenis baik dari jenis kuliner, fashion, otomotif hingga kebutuhan anak. Yang termasuk kedalam jenis UMKM bukan hanya soal menjual barang, melainkan penyedia jasa pun termasuk kedalam jenis UMKM. Menurut hasil wawancara UMKM yang terbanyak melakukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta adalah UMKM dalam bidang pasar. *"kebanyakan bidang pasar mbak, jual beli buah, sayur, mabel contohnya orang beli kayu lalu dibikin kursi, lemari dll. Ada juga yang punya apotik, dan pembelian sapi dalam jumlah kecil"*.

Syarat untuk melakukan pembiayaan di BPRS Formes selama masa pandemi ini masih sama seperti sebelum pandemi yaitu meliputi:

a. Wiraswasta/profesi/perorangan
   - Usaha telah berjalan minimal 1 tahun
   - Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

- Surat keterangan/ijin usaha
- Fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah (masing-masing 2 lembar)
- Slip gaji terakhir
- Fotocopy agunan sertifikat atau BPKB (masing-masing 2 lembar)
- Memiliki rekening tabungan/deposito di BPRS Formes

b. Badan Usaha

- Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- Fotocopy legalitas usaha (akte pendirian, SIUP/TDP, NPWP)
- Lap keu 3 bulan terakhir / *cash flow*
- Fotocopy agunan sertifikat atau BPKB (masing-masing 2 lembar)
- Memiliki rekening tabungan /deposito di BPRS Formes

Dari 5 macam produk pembiayaan yang terdapat di BPRS Formes Yogyakarta, pembiayaan murabahah lah yang paling banyak digunakan oleh UMKM pada masa pandemi seperti berupa pembelian langsung atas bahan baku usaha.

5. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (ANNA%20MARIANA).

Untuk memperoleh pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta, nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan sebuah

prosedur atau aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana pada bank-bank umum lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini tentu pihak lembaga akan menggali informasi lebih mengenai nasabah. Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid seperti:

- kondisi usaha suatu calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha
- Riwayat angsuran dimasa lalu
- Riwayat pembiayaan serta angsurannya dibank lain
- keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- tujuan penggunaan dari pembiayaan
- lokasi usaha
- jaminan
- kelengkapan surat-suratnya (legalitas)

Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *customer*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 6C + 1S yaitu:

a. *Character*

Karakter adalah penilaian terhadap watak atau karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya dan mendapat informasi yang jelas tentang karakter atau privasi nasabah yaitu:

- Melihat Riwayat hidup
- Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah
- Melihat pergaulan dan usia
- Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon nasabah
- Meminta informasi dari bank lain

b. *Capacity*

Capacity adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, administrasi, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan; bahkan kemampuan untuk merebut pasar.

c. *Capital*

Capital (modal) adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan (nasabah) yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Biasanya dalam capital tidak berbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesin. Untuk mengukur kemampuan perseorangan, dapat dilihat dari kekayaan individu setelah kewajibannya terlunasi. Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Biasanya jaminan ada yang berbentuk surat dan barang berharga. Namun tidak semua jaminan berwujud (bersifat kebendaan) tetapi jaminan juga ada yang tidak berwujud, contohnya jaminan pribadi dan rekomendasi. Jaminan yang diberikan tentunya harus memiliki nilai ekonomis bagi barang-barang yang dijadikan jaminan, serta agunan tersebut harus memenuhi syarat yuridis.

e. *Condition*

Condition (kondisi), dalam hal syariah harus melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Kondisi eksternal yang perlu diperhatikan ialah, kondisi politik, perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, persediaan bahan baku, system penjualannya dan tentunya peraturan pemerintah terhadap peredaran produk-produk tertentu yang dihasilkan.

f. *Contrains*

Contrains adalah penilaian factor sosial dan psikologis dari masyarakat berupa Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

g. *Syariah*

Syariah adalah penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum islam.

Dalam pemberian pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi resiko yang tidak diduga, seperti ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam membayar angsurannya atau hutang nasabah kepada bank dan juga dari segi agunan yang dijaminkan nasabah. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Formes sebelum mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi berapa pembiayaan yang dibutuhkan dan digunakan untuk apa, contoh: mengajukan 10 Juta untuk pembelian material, usaha batako.
- Melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, untuk melihat berapa persen jaminan mampu mengcover. (jabarin soal jaminan)
- Mengidentifikasi kemampuan nasabah dalam membayar.
- Melakukan survei terhadap kisaran dana dalam pembuatan batako, apakah sesuai dengan dana yang nasabah ajukan.

Selama pandemi berlangsung biaya terbesar yang pernah dikeluarkan oleh BPRS Formes Yogyakarta dalam menangani dampak Covid-19 terhadap UMKM mencapai tempo 200 Juta untuk 1 UMKM. *"1 UMKM bisa sampe tempo 200 Juta, ada proyek untuk bikin billboard buat iklan*."

6. Studi Kelayakan

Studi kelayakan bisnis syariah adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak (diterima) atau tidak layak (ditolak) usulan suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah islam dalam rengka rencana investasi perusahaan. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan khususnya bagi para investor selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi pembiayaan, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, yang tentunya memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan pembiayaan yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya.

Dari berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya, di BPRS Formes Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara salah satu aspek penting untuk mendapatkan pembiayaan adalah dilihat dari kondisi UMKM tersebut. UMKM yang mendapatkan pembiayaan di BPRS Formes adalah UMKM yang sekiranya tidak terlalu terdampak dengan pandemi yang sedang berlangsung saat ini dan masih memiliki penghasilan setiap bulannya serta memiliki kemampuan untuk membayar, agar terdapat kepastian dari nasabah terhadap bank untuk membayar angsuran.

Tabel 4.1 Hasil Penelitian

ASPEK	HASIL
1. Sistem Pengawasan	- Pengawasan dilakukan oleh semua bagian organisasi tetapi bagian marketing memiliki tanggungjawab besar dalam melakukan pengawasan langsung.

	- Bidang marketing melakukan *monitoring* tiap bulan dengan pembagian jumlah marketing dibagi banyaknya UMKM. - Doa bersama, mendengarkan dan dicarikan solusi dari keluh kesah nasabah, dan bentuk sosial seperti bantuan sembako. - Terus melakukan evaluasi sistem seperti *monitoring* perkembangan usaha dan menjalin komunikasi baik.
2. Kendala	- Nasabah kurang mengerti soal digitalisasi, pelaku UMKM positif *Covid-19*, Nasabah meninggal akibat *Covid-19*, dan lamanya masa PPKM.
3. Kualitas Layanan	- Memberikan empati kepada nasabah berupa perhatian mengenai kebutuhan dan kendala. - Kinerja bank yang baik seperti: Rasio NPF dan tingkat margin yang rendah, terdapat lembaga penjamin, menjalin komunikasi dengan baik.
4. Pembiayaan UMKM	- Menangani kurang lebih 10 UMKM perbulan. - UMKM yang banyak melakukan pembiayaan adalah sektor pasar, mabel, apotik, dan pembelian sapi jumlah kecil. - Tidak ada syarat khusus untuk melakukan pembiayaan dimasa pandemi, masih sama seperti pembiayaan biasanya. - Pembiayaan murabahah yang paling banyak digunakan.
5. Analisis Pembiayaan	- Melihat Riwayat angsuran, segi kemampuan membayar, perhitungan jaminan yang diajukan. - 6C + 1S. - Mengidentifikasi jumlah pembiayaan dan kemampuan dalam membayar, melakukan

	survey kisaran dana terhadap kebutuhan nasabah.
6. Studi Kelayakan	- Kondisi UMKM yang tidak terlalu terdampak dan masih mendapatkan penghasilan setiap bulannya

C. Pembahasan

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih selama 1,5 tahun memberikan dampak ganda yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga mengancam seluruh aspek kehidupan, mulai dari keamanan, sosial, budaya bahkan ekonomi. Dimana banyak bisnis yang telah terkena dampak pandemi ini, namun sektor UMKM-lah yang sangat terpukul karena rantai pasokan mereka yang terganggu, sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat yang disebabkan aturan pembatasan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak pandemi Covid-19 akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan jika tidak ditanggulangi.

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi usahanya yaitu dengan cara mencari bantuan pembiayaan terhadap usahanya. Maka peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Bantuan pembiayaan bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan yang sekarang sudah berkembang pesat dimasyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu bentuk BPRS Formes Yogyakarta dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta. Keandalan atau kemampuan bank untuk melaksanakan pelayanan secara cepat dan ketanggapan dalam membantu nasabah merupakan bentuk kualitas pelayanan baik yang diberikan BPRS Formes Yogyakarta. Selain itu empati yang diberikan BPRS Formes Yogyakarta terhadap

nasabah merupakan bentuk layanan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi saat ini. Layanan empati tersebut berupa perhatian seperti mendengarkan kebutuhan para nasabah salah satunya terkait kemampuan dalam mengangsur pembiayaan, melakukan monitoring rutin terhadap usaha nasabah. Hal ini mengkonfirmasi penelitian (sumarni, 2020) yang juga memaparkan bahwa harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan, serta memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan.

Selain memberikan kualitas yang baik, sebagai suatu lembaga keuangan yang bergantung pada kepercayaan masyarakat rasa percaya nasabah terhadap bank akan mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan. Menurut hasil penelitian cara BPRS Formes Yogyakarta memberikan rasa percaya kepada nasabah adalah dengan memberikan hasil kinerja yang baik, seperti: rasio NPF yang rendah yang dapat membuktikan bahwa kinerja bank dalam memberikan analisis pinjaman pembiayaan tergolong tepat, kemudian tingkat margin yang rendah, terdapat lembaga penjamin yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah, serta menjalin komunikasi yang baik yang berdampak menciptakan tingkat loyalitas nasabah terhadap perusahaan. Hal ini pun dibuktikan pada penelitian lain bahwa *ability* atau kemampuan bank dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah (Trisusanti, 2017).

Terdapat 10 UMKM perbulannya yang melakukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta jika dilihat dari awal pandemi berlangsung hingga saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa jenis sektor UMKM yang ada di Indonesia, sektor pasar seperti pedagang buah dan sayur lah yang paling banyak mengajukan pembiayaan selama pandemi *Covid-19*. Tidak ada persyaratan khusus atau baru yang dikeluarkan BPRS Formes Yogyakarta untuk melakukan pengajuan pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*. Dari kelima macam produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Formes Yogyakarta, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan kesamaan pada penelitian (Rahman,

2020) yang memaparkan bahwa selama pandemic Covid-19 terjadi ketidakstabilan pembiayaan dimana terjadi penurunan pada pembiayaan mudharabah dan terjadi peningkatan pada sisi pembiayaan murabahah.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan pernah terlepas dari resiko pembiayaan. Semakin besar pembiayaan, resiko yang ditanggung juga akan besar. Untuk memperoleh pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta, nasabah harus memenuhi persyaratan sesuai prosedur pembiayaan sebagaimana pada bank umum lainnya. Sama halnya seperti pada penelitian (Pato, 2013) yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan sesuai dengan prinsip penilaian kredit 6C+1S serta melakukan investigasi terhadap berkas, jaminan, lokasi usaha dan data Riwayat pembiayaan di bank lainnya.

Namun, tidak semua UMKM secara bebas mendapatkan pencairan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Yaitu dengan mempertimbangkan kondisi UMKM yang baru akan mengajukan pembiayaan pada masa pandemi. Di BPRS Formes Yogyakarta UMKM yang mendapatkan pencairan pembiayaan adalah UMKM yang sekiranya tidak terlalu terdampak dengan pandemi Covid-19 dan masih memiliki penghasilan setiap bulannya, serta memiliki kemampuan untuk membayar. Hal tersebut terkonfirmasi dalam penelitian (Muttaqin, Kosim, & Abrista, 2021) bahwa untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan dapat dipermudah asalkan usaha itu tidak terlalu terkena dampak secara signifikan. Agar terdapat kepastian dari nasabah terhadap bank untuk membayar angsuran.

Selain memberikan pelayanan yang baik, membangun rasa percaya, serta memberikan bantuan pembiayaan. BPRS Formes Yogyakarta senantiasa melakukan pengawasan rutin berupa *monitoring* terhadap jalannya usaha. Hal serupa juga dilakukan pada penelitian (Pato, 2013) yaitu melakukan proses *monitoring* untuk melakukan pengawasan bagaimana usaha nasabah, serta agunan

yang dijaminkan nasabah. Proses ini sangat berguna sehingga pekerjaan atau kegiatan yang sedang berjalan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu, peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta adalah dengan melakukan doa bersama seluruh karyawan untuk kemudahan nasabah terhadap usahanya, memberikan restrukturisasi pembiayaan terhadap UMKM yang terdampak dengan adanya pandemic Covid-19, dan yang terakhir berupa bantuan sosial berupa bantuan sembako untuk UMKM yang melakukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta. Peran dan upaya tersebut merupakan salah satu bentuk fitur dari Maqasid Syariah. Maqasid syariah adalah tujuan syariah untuk meringankan dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat, perbaikan kehidupan masyarakat dan perlindungan dari kesulitan dan unsur-unsur jahat **Invalid source specified.**.

Peran dan upaya yang dilakukan BPRS Formes Yogyakarta ini sejalan dengan hasil penelitian (Cahyono, Erwin, & Asiah, 2021) yang melakukan perannya berupa bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, restrukturisasi atas pembiayaan yang sedang berjalan, restrukturisasi atas pembiayaan baru, melakukan pelatihan usaha mikro, serta membentuk komunitas penguasa mikro.

Dalam proses pelaksanaan peran dan upaya yang dilakukan BPRS Formes Yogyakarta pasti akan ditemukan beberapa gejolak yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan sebuah strategi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPRS Formes Yogyakarta dalam mendukung penanggulangan dampak *Covid-19* diantaranya adalah pertama, nasabah yang kurang mengerti mengenai digitalisasi, kendala ini dirasakan pula oleh Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja yang mengatakan bahwa meski digitalisasi semakin marak, namun perseroan tidak akan meninggalkan nasabah non milenial yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun menjadi nasabah. “mereka ini yang relatively kadang-kadang agak gaptek. Ini harus ada dua market yang kita layani.” Ujar Jahja dalam seminar daring *The Finance* bertajuk “*How can digitalization help financial sector coping with crisis & COVID-19 impact*”.

Adapun kendala lain yang dihadapi BPRS Formes Yogyakarta adalah nasabah selaku pelaku UMKM yang terpapar virus Covid-19 mengakibatkan beberapa problem salah satunya adalah akibat masih menggunakan sistem *door to door* maka pihak bank terkendala tidak dapat melakukan kontak langsung sehingga sulit dalam melakukan *monitoring*. Kemudia nasabah meninggal akibat Covid-19, untuk kasus satu ini pembiayaan yang terdapat di BPRS Formes Yogyakarta sudah diasuransikan, BPRS Formes Yogyakarta banyak menjalin kerjasama dengan asuransi jiwa JMA. Dimana asuransi ini dapat mengcover pembiayaan sebesar 50% dan sisanya akan ditanggung oleh ahli waris. Dan kendala yang terakhir adalah terkait lamanya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimana menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian sehingga penyaluran pembiayaan tidak dapat berjalan secara optimal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta dalam mendukung penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. BPRS Formes Yogyakarta berperan penting dalam mendukung penanggulangan UMKM pada masa pandemi Covid-19 yaitu memberikan bantuan materil dengan melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19, dan memberikan bantuan sosial seperti pembagian sembako kepada UMKM.
2. BPRS Formes Yogyakarta memberikan dukungan berupa bantuan moril seperti Melakukan doa bersama seluruh karyawan terhadap usaha nasabah yang dilakukan secara rutin sebelum memulai perkerjaan, serta berempati memberikan perhatian mengenai kebutuhan dan kendala.

B. Saran

Berkaca pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BPRS Formes Yogyakarta tidak hanya memberikan bantuan pembiayaan saja namun harapannya dapat memberikan pelatihan khusus bagi nasabah dalam menghadapi transformasi digitalisasi 4.0.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah kajian mengenai kendala subjektif yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro

Syariah di Indonesia dalam menghadapi masa pandemi agar dapat dijadikan sebagai evaluasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 119-133.

BAEHAQI, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di indonesia. *JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS*, 119-133.

Cahyono, A., E. S., & A. W. (2021). PERAN BANK SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19. *ekonomi dan perbankan syariah*, 198-214.

Dewi, C. I. (2021). Upaya Pengembangan dan Pemasaran UMKM dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Desa Akibat Pandemi Covid-19. *jurnal abdi masyarakat*, 54-60.

Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. (2021). Analisis Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal penelitian mahasiswa ilmu sosial, ekonomi, dan bisnis islam*, 83 - 94.

Erlindawati. (2017). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. 82-97.

Fatoni, A. (2017). ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI PATI). 1-73.

Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Vol. XVIII No.2 Oktober* , 297-312.

Gwadabe, N. A., & Rahman, A. A. (2020). THE ROLE OF ISLAMIC FINANCE IN MITIGATING THE ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 TOWARDS THE ATTAINMENT OF MAQASID AL SHARIAH: A CASE STUDY OF WAQF INSTITUTIONS IN KANO STATE, NIGERIA. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 59-70.

Hafizd, J. Z. (2020). PERAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 138-148.

Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *EduPsyCouns*, 147.

Huberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19∗. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 625-638.

kusjuniati. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *ilmu pendidikan dan ekonomi*, 2-4.

Mubarok, F., & Rusdianto. (2019). Studi Kelayakan Bisnis. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 169-178.

Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). PRINSIP EKONOMI SYARIAH, IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN SOLUSINYA DALAM REALITAS POLITIK INDONESIA TERKINI. *Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, 1-13.

Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & A. D. (2021). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 235-244.

Nathania, M. M. (2019). PERAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA MEDAN (Studi pada dinas koperasi dan UMKM kota Medan). 4.

Ningrum, E. R. (2021). Strategi Digital Marketing dalam peningkatan nasabah bank muamalat kantor cabang kediri pada masa pandemi Covid-19. 62-77.

Pato, S. (2013). ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO. *EMBA*, 875-885.

Rafidah. (2014). Kualitas pelayanan islami pada perbankan syariah. *Nalar Fiqh*, 113-116.

Rahman, A. (2020). Analisis Pembiayaan pada masa pandemic. *Ekonomi Islam*, 144-154.

Rohman, M. M. (2011). JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS. *al Mizan*, 194-205.

Romaji, H. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DALAM MERANGKUL USAHA MIKRO KECIL MENGENGAH (UMKM). *Madani Syariah*, 67-81.

Salilo, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Media Intervening. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 413-432.

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 76-84.

Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 145-162.

sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Ekonomi dan Perbankan syariah*, 47-57.

Sunyoto, D. (2014). studi kelayakan bisnis. *Caps*, 2.

Susilo, Y. S. (2010). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY. *Jurnal keuangan dan perbankan* , 467-469.

Tambunan. (2009). *UMKM di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Trisusanti, Y. (2017). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru). *JOM FISIP*, 1-16.

wahab, w. (2017). pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah industri perbankan syariah di kota pekanbaru. *kajian ekonomi islam*, 51-64.

Welta, F. (2017). PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SURYA BAROKAH. *I-Economic*, 129-148.

wijaya, O. Y. (2020). The Impact of Covid-19 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java Province, Indonesia and Strategies for Overcoming: Ad Interim. *Talent Development & Excellence*, 3454-3469.

Yudistira, E. (2019). ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *akuntansi dan perbankan syariah*, 160-163.

Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 3.

Yunitarini, S. (2007). PROSPEK DAN KENDALA BANK SYARIAH DI ERA GLOBALISASI. *jurnal ekonomi dan bisnis*, 166-179.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat izin penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 724/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 17 Juni 2021 M / 6 Zulqa'dah 1442 H

Kepada : Yth. Pimpinan BPRS Formes Yogyakarta
Jl. Gito Gati KM.1, Sendangadi, Mlati
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : GHITHA NABILAH AZMI
No. Mahasiswa : 17423056
Program Studi : Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Peran BPRS Formes Yogyakarta dalam Mendukung Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran 2

Transkrip hasil wawancara

Narasumber : Eva Esti Rahayu

Jabatan : Staff Financing dan Funding

Waktu : 5 Agustus 2021

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Sistem Pengawasan	1. Apakah semua pihak melakukan pengawasan terhadap kasus ini atau hanya pihak tertentu? 2. Untuk bagian marketing yang melakukan *controlling* langsung, apakah ada peran khusus yang harus dilakukan terhadap penanggulangan dampak *Covid-19* UMKM? 3. Sejauh ini peran dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19*	1. Semuanya ikut mengawasi, tapi yang paling mengawasi yang megang monitoring itu kita sebagai marketing biasanya yang paling mengawasi. Tapi tidak menutup kemungkinan karyawan-karyawan lain itu juga ikut mengawasi. Soalnya terkadang kita megang 1 UMKM yang ternyata tetangganya teller. Nanti si teller itu juga memberitahukan. Jadi ya semua terlibat. Tapi kalo yang tanggungjawab yang marketing.

	terhadap UMKM? 4. Bagaimana cara BPRS Formes Yogyakarta melakukan penataan terhadap UMKM? 5. Apakah BPRS Formes Yogyakarta sudah melaksanakan perannya secara maksimal? 6. Bagaimana evaluasi peran dan upaya BPRS Formes Yogyakarta yang sudah dilakukan sampai saat ini, dan apa rencana ke depan?	2. Kita kan ada monitoring tiap bulannya, jadi setiap marketing itu setiap orang pasti megang beberapa UMKM jadi ga dipokokkan untuk satu orang. Jadi banyak UMKM itu dibagi 5 marketing. Jadi satu marketing itu kadang bisa megang sampe 60 - 90an. Itu belum termasuk yang kolekting (khusus yang agak macett) 3. Perannya kita tiap pagi pasti ada doa bersama karyawan, kita mendoakan para nasabah yang mengambil pembiayaan sama kita tu agar mereka dipermudah dalam usahanya, diberikan kelancaran dalam mengangsur. Kedua, apa yang menjadi keluh kesah umkm itu kita dengan dan kita carikan solusinya

		missal kalau mereka bener bener terdampak dan tidak bisa melakukan angsuran seperti biasanya ya kita merekomendasikan restruck saja, terkadang UMKMnya sendiri udah sadar untuk mengajukan restruck sendiri. Langsung menyodorkan surat pernyataan kalau baru terdampak covid, mengalami penurunan untuk bisa membayar angsuran penuh. Ketiga, orang yang malah bisa mengangsur secara lancer dan juga memiliki Riwayat yang baik, kita tuh kadang ada program memberikan bantuan sembako isinya kadang beras 5kg, gula, the, indomi dll kebutuhan pokok.

		4. Karena kita juga jasa keuangan jadi focus pada pembiayaan dan penghimpunan dana **5.** Sudah, Ketika butuh kita coba memberi, dan Ketika kita meminta kewajiban kita (angsuran) nasabahnya juga sudah memberi. 6. Tetep monitoring, terus untuk rencana kedepannya lebih intensif maksudnya komunikasinya. Tapi kita juga gabisa soalnya kan kita tu sulit untuk kontak langsung ke UMKM karena lagi pandemic gini apalagi awal tahun ini bener bener kita mau berkunjung aja mentok Cuma 5 menit ketemu tu kadang takut kalo lama lama soalnya apalagi lagi kaya gini. Rencananya si tetep monitoring sama komunikasi

		selalu dijaga maksudnya intensif banget komunikasinya.
Kendala	1. Apa saja hambatan yang dirasakan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 2. Apakah ada nasabah yang nakal seperti berbohong atau melakukan penipuan?	1. Pelaku umkmnya positif covid jadi kan otomatis gabisa contact langsung, bisanya Cuma dari jarak jauh. Atau pelaku UMKMnya lagi isoman kita kan gabisa monitoring secara langsung, kedua ada yang meninggal karena COVID tapi untungnya pembiayaan itu diangsurasikan jadi ada angsuransi yang bisa mengcover pembiayaannya walaupun itu ga penuh. Angsuransinya dari JMI itu ada perhitungannya sendiri dan itu tergantung plafon sama jangka waktu yang diambil. 2. Sejauh ini alhamdulillah gaada, survey sebelum kita mencairkan dana

		itu bener bener berhasil, apalagi lagi pandemic kita juga berhati hati banget
Kualitas Pelayanan	1. Bagaimana pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam memberikan perhatian kepada nasabah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginannya? 2. Bagaimana BPRS Formes Yogyakarta memberikan rasa percaya kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan disana?	**1.** Coba mendengarkan kebutuhan mere kapa? Semisal UMKM yang melakukan pembiayaan mengalami penurunan dalam angsuran missal semula angsurannya 1jt terus dia mampunya Cuma 500rb, nanti kita menawarkan restruck (selama pandemic restruck itu sampai maret 2022 (kebijakan ojk)) jadi yang bener bener butuh dibantu nanti ke restruck, dari segi sosial juga justru UMKM yang sekiranya lancer angsurannya, kita kan ada dana social dari qardhul hasan itu nanti kaya ngasih bantuan sembako. **2.** Kalau untuk pembiayaan, mungkin bisa dilihat dari segi margin atau

		simulasi angsurannya. Tapi kalo dari segi penghimpunan dana itu kita bisa bilang kalau selama pandemic ini justru NPF kita malah turun kok ga begitu naik.
Pembiayaan UMKM	1. Selama pandemi berlangsung ada berapa banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta? 2. UMKM bidang apa yang melakukan pembiayaan di masa pandemic *Covid-19*? 3. Apakah ada syarat tertentu atau syarat lain saat melakukan pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*? 4. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam rangka	1. Setiap bulan kira-kira 10 UMKM, jadi bisa dikalikan aja. 10 UMKM itu rata-rata perbulannya. 2. Kebanyakan bidang pasar, jual beli. Pedagang buah, sayur, mabel (orang beli kayu dibikin kursi lemari dll), apotik, pembelian sapi. 3. Syarat masih sama seperti sebelum pandemic, seperti fotocopy ktp, kk, surat nikah, fotocopy jaminan, dan pihak BPRS survey ke lokasi. Sering melakukan monitoring tentang bagaimana usahanya masih berjalan atau tidak.

	menanggulangi dampak dari Covid-19?	4. Murabahah, jadi kaya pembelian langsung bahan bakunya seperti buah, kayu, material.
Analisis Pembiayaan	1. Apa yang diperhitungkan pertama kali untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah? 2. Bagaimana cara perhitungan kisaran dana pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah? 3. Sampai saat ini berapa biaya terbesar yang dikeluarkan Bank dalam menangani dampak *Covid-19* terhadap UMKM?	1. Lihat Riwayat angsuran dia, kaya ngecek pembiayaan dia dibank lain lalu Riwayat angsurannya bagaimana, kedua dari segi kemampuan bayarnya, ketiga jaminannya kira kira bisa mengcover ga untuk pembiayaan yang diajukan. 2. Tanya terlebih dahulu kebutuhannya berapa, digunakan untuk apa. Misalnya dia mengajukan 10jt kebutuhannya buat material, dia punya usaha batako. Nanti pihak bank langsung ngecek jaminannya bisa mengcover berapa rupiah, kedua kira kira nasabah ini kemampuan bayarnya berapa, ketiga kira kira

		untuk pembuatan batako yang sesuai dengan dia inginkan itu sebenernya dana yang dibutuhkan itu berapa 3. 1 UMKM bisa sampe tempo 200jt ada proyek untuk bikin billboard buat iklan.
Studi Kelayakan	1. Kondisi UMKM yang seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta?	1. Kondisi UMKM yang sekiranya tidak terlalu terdampak sama covid, yang masih memiliki penghasilan setiap bulannya, memiliki kemampuan bayar. Agar ada kepastian dalam membayar angsuran.

Narasumber : Agustina Widyaningsih

Jabatan : Deskmen Pembiayaan dan Personalia

Waktu : 16 September 2021

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Sistem Pengawasan	1. Apakah semua pihak melakukan	1. Ya

	pengawasan terhadap kasus ini atau hanya pihak tertentu? 2. Sejauh ini peran dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 3. Bagaimana cara BPRS Formes Yogyakarta melakukan penataan terhadap UMKM? 4. Apakah BPRS Formes Yogyakarta sudah melaksanakan perannya secara maksimal?	2. Memberikan restrukturisasi 3. Dengan memilah-milah nasabah 4. Ya
Kendala	1. Apa saja hambatan yang dirasakan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 2. Apakah ada nasabah yang nakal seperti berbohong atau melakukan	1. Banyak yang terdampak 2. Tidak

	penipuan?	
Kualitas Pelayanan	1. Bagaimana pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam memberikan perhatian kepada nasabah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginannya? 2. Bagaimana BPRS Formes Yogyakarta memberikan rasa percaya kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan disana?	1. Sangat diperhatikan. 2. Ada lembaga penjamin, itu terkait dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) jadi kalau misal bank mengalami likuiditas maka tabungan akan dijamin sampai dengan 2M mba.
Pembiayaan UMKM	1. Selama pandemi berlangsung ada berapa banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta? 2. UMKM bidang apa yang melakukan pembiayaan di masa pandemic *Covid-19*? 3. Apakah ada syarat tertentu atau syarat lain saat melakukan	1. 150 2. Perdagangan 3. Tidak 4. Murabahah

	pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*? 4. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam rangka menanggulangi dampak dari Covid-19?	
Analisis Pembiayaan	1. Apa yang diperhitungkan pertama kali untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah? 2. Bagaimana cara perhitungan kisaran dana pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah? 3. Sampai saat ini berapa biaya terbesar yang dikeluarkan Bank dalam menangani dampak *Covid-19* terhadap UMKM?	1. 5 C + 1 S 2. 5 C + 1 S 3. Kurang tau

Studi Kelayakan	1. Kondisi UMKM yang seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta?	1. Sehat

Narasumber : Dwi Wulaningsih

Jabatan : Akunting dan Pelaporan

Waktu : 17 September 2021

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Sistem Pengawasan	1. Apakah semua pihak melakukan pengawasan terhadap kasus ini atau hanya pihak tertentu? 2. Sejauh ini peran dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 3. Bagaimana cara BPRS Formes Yogyakarta melakukan penataan	1. Pihak tertentu 2. Ya memberikan keringanan angsuran itu kepada nasabah yang berdampak 3. Diklasifikasikan, diberikan bantuan kepada nasabah yang kurang mampu akibat Covid-19 4. Ya

	terhadap UMKM? 4. Apakah BPRS Formes Yogyakarta sudah melaksanakan perannya secara maksimal?	
Kendala	1. Apa saja hambatan yang dirasakan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 2. Apakah ada nasabah yang nakal seperti berbohong atau melakukan penipuan?	1. Nasabah ada yang masih gaptek, lamanya PPKM. 2. Tidak ada
Kualitas Pelayanan	1. Bagaimana pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam memberikan perhatian kepada nasabah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginannya? 2. Bagaimana BPRS Formes Yogyakarta memberikan rasa percaya kepada nasabah untuk melakukan	1. Di maintenen terus 2. Kedekatan emosional biasanya

	pembiayaan disana?	
Pembiayaan UMKM	1. Selama pandemi berlangsung ada berapa banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta? 2. UMKM bidang apa yang melakukan pembiayaan di masa pandemic *Covid-19*? 3. Apakah ada syarat tertentu atau syarat lain saat melakukan pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*? 4. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam rangka menanggulangi dampak dari Covid-19?	1. Sekitar 150an 2. Perdagangan, jasa 3. Tidak 4. Pembiayaan apa saja, mulai dari pembiayaan untuk UMKM, untuk kebutuhan Pendidikan, konsumsi dll… yang penting layak sesuai SOP dan ketentuan
Analisis Pembiayaan	1. Apa yang diperhitungkan pertama kali untuk memberikan pembiayaan	1. Character dan Capacity

	kepada nasabah? 2. Bagaimana cara perhitungan kisaran dana pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah? 3. Sampai saat ini berapa biaya terbesar yang dikeluarkan Bank dalam menangani dampak *Covid-19* terhadap UMKM?	2. Duh marketing yang tau e mba, saya lupa, ini lagi momong anak, maaf y amba 3. Dikasih keringanan angsurannya sih mba, tetep tidak mengurangi kewajiban
Studi Kelayakan	1. Kondisi UMKM yang seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta?	1. Yang layak untuk mendapatkan pembiayaan, biasanya yang sudah berjalan, bukan UMKM yang baru mau mulai.

Narasumber : Noor Latifah DF

Jabatan : Teller

Waktu : 17 September 2021

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Sistem Pengawasan	1. Apakah semua pihak melakukan	1. Pihak tertentu

	pengawasan terhadap kasus ini atau hanya pihak tertentu? 2. Sejauh ini peran dan upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 3. Bagaimana cara BPRS Formes Yogyakarta melakukan penataan terhadap UMKM? 4. Apakah BPRS Formes Yogyakarta sudah melaksanakan perannya secara maksimal?	2. Restruck pembiayaan 3. Dibuat pemetaan 4. insyaAllah
Kendala	1. Apa saja hambatan yang dirasakan BPRS Formes Yogyakarta dalam menanggulangi dampak *Covid-19* terhadap UMKM? 2. Apakah ada nasabah yang nakal seperti berbohong atau melakukan	1. Belum ada 2. Tidak

	penipuan?	
Kualitas Pelayanan	1. Bagaimana pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam memberikan perhatian kepada nasabah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginannya? 2. Bagaimana BPRS Formes Yogyakarta memberikan rasa percaya kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan disana?	1. Selalu di monitoring 2. Komunikasi dengan baik
Pembiayaan UMKM	1. Selama pandemi berlangsung ada berapa banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan di BPRS Formes Yogyakarta? 2. UMKM bidang apa yang melakukan pembiayaan di masa pandemic *Covid-19*? 3. Apakah ada syarat tertentu atau syarat lain saat melakukan	1. 150 2. Perdagangan 3. Tidak 4. Murabahah

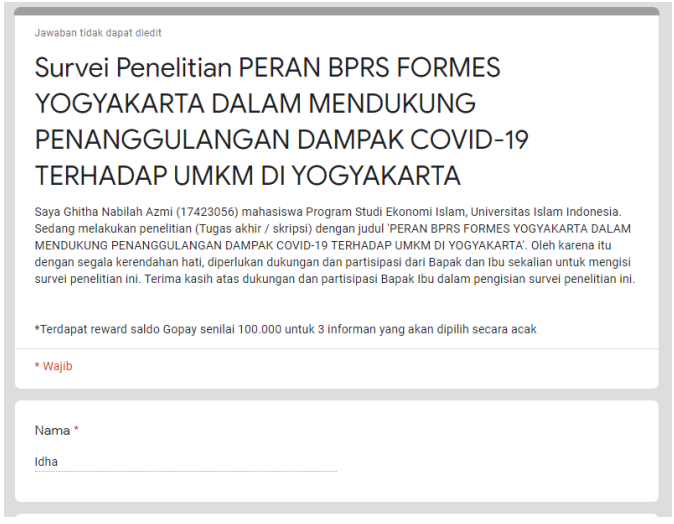
	pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*? 4. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Formes Yogyakarta dalam rangka menanggulangi dampak dari Covid-19?	
Analisis Pembiayaan	1. Apa yang diperhitungkan pertama kali untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah? 2. Bagaimana cara perhitungan kisaran dana pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah? 3. Sampai saat ini berapa biaya terbesar yang dikeluarkan Bank dalam menangani dampak *Covid-19* terhadap UMKM?	1. Karakter 2. 70% dari pendapatan 3. Tidak tahu

Studi Kelayakan	1. Kondisi UMKM yang seperti apa yang akan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Formes Yogyakarta?	1. Yang sehat

Lampiran 4

Bukti Wawancara





Jawaban tidak dapat diedit

Survei Penelitian PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA

Saya Ghitha Nabilah Azmi (17423056) mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Sedang melakukan penelitian (Tugas akhir / skripsi) dengan judul 'PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA'. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, diperlukan dukungan dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi survei penelitian ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dalam pengisian survei penelitian ini.

*Terdapat reward saldo Gopay senilai 100.000 untuk 3 informan yang akan dipilih secara acak

* Wajib

Nama *

Idha

Jawaban tidak dapat diedit

Survei Penelitian PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA

Saya Ghitha Nabilah Azmi (17423056) mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Sedang melakukan penelitian (Tugas akhir / skripsi) dengan judul 'PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA'. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, diperlukan dukungan dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi survei penelitian ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dalam pengisian survei penelitian ini.

*Terdapat reward saldo Gopay senilai 100.000 untuk 3 informan yang akan dipilih secara acak

* Wajib

Nama *

Wulan

Jawaban tidak dapat diedit

Survei Penelitian PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA

Saya Ghitha Nabilah Azmi (17423056) mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Sedang melakukan penelitian (Tugas akhir / skripsi) dengan judul 'PERAN BPRS FORMES YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI YOGYAKARTA'. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, diperlukan dukungan dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi survei penelitian ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dalam pengisian survei penelitian ini.

*Terdapat reward saldo Gopay senilai 100.000 untuk 3 informan yang akan dipilih secara acak

* Wajib

Nama *

Latifah

RIWAYAT HIDUP



Ghitha Nabilah Azmi, atau akrab dipanggil Ghitha, lahir di Bandar Lampung 07 Maret 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Siswanto dan ibu Mariani. Penulis memiliki satu kakak Perempuan dan kakak laki-laki. Menempuh Pendidikan di TK Al – Azhar IV Bandar Lampung pada tahun 2005-2006, SD Al – Azhar II Bandar Lampung pada tahun 2006-2012, SMP Negeri 29 Bandar Lampung tahun 2012-2015, SMA IT Future Gate Boarding School Bekasi pada tahun 2015-2017, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia program studi Ekonomi Islam sampai saat ini. Selain kuliah, penulis aktif di organisasi serta kepanitiaan. Organisasi yang pernah diikuti oleh penulis selama kuliah seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan atau biasa disebut Forum Kajian Islam (FKEI) Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Penulis memiliki hobi salah satunya kesenian seperti melukis, mewarnai dan merajut.